

BAB I

PENDAHULUAN

Kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa tergantung pada sikap dan tindakan mereka sendiri. Penulis melakukan penelitian studi komparatif sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman tentang perencanaan pembangunan perdesaan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar Ra'du ayat 11 "bahwa sebagai manusia harus berubah kearah yang positif"

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴿١١﴾

Artinya : "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri....." (QS.Ar Ra'du ayat 11)

1.1 Latar Belakang

Menurut Muhi (2011), perencanaan pembangunan yang dilakukan manusia pada awalnya didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin maju suatu peradaban dan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia akan mendorong umat manusia menggunakan kecerdasannya untuk melakukan upaya pembangunan tertentu guna pemenuhan kebutuhannya. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yang pertama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di perdesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

Kedua, pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani, yaitu pembangunan yang objek utamanya aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, *skill* dan memberdayakan masyarakat di daerah perdesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari berbagai belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya disebut sebagai Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Wilayah Indonesia dari segi luasan kawasan masih didominasi oleh luasan kawasan perdesaan (*rural*) dibanding kawasan perkotaan (*urban*). Fungsi kawasan perdesaan (*rural*) bagi pembangunan nasional maupun regional tidak kalah pentingnya dibandingkan kawasan perkotaan dan metropolitan. Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri dan akan terkait dengan pengembangan wilayah yang lebih luas. Suatu wilayah bisa disebut kawasan perdesaan karena mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan kawasan perkotaan. Suatu kawasan yang aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi penduduknya bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam setempat atau pertanian dinamakan dengan kawasan perdesaan. Namun dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan.

Kawasan perdesaan juga menjadi pendukung dan tulang punggung pembangunan nasional, karena sumber daya alam sebagian besar berada di kawasan perdesaan, namun tekanan kemajuan dan urbanisasi membuat kawasan perdesaan menjadi terkesampingkan dalam proses pemerataan pembangunan. Konsep pengembangan perdesaan berkelanjutan menjadi penting untuk disusun karena sumber pertanian dan sumber daya alam lainnya, yang menjadi energi dari pembangunan nasional berada pada kawasan perdesaan.

Di Malaysia pada tahap awal setelah kemerdekaan, terlihat beberapa masalah umum perekonomian yang dihadapi oleh perdesaan Malaysia, seperti angka kemiskinan, kurangnya akses ke infrastruktur dasar, kesehatan yang buruk dan pendidikan. Di balik kejadian ini, ada variasi kondisi pedesaan seperti sumber daya, sosial budaya, politik dan ekologi memiliki pengaturan fisik yang

berbeda masing-masingnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pedesaan sering diabaikan karena banyaknya keragaman konteks pedesaan.

Sedangkan untuk isu pembangunan pedesaan dan tantangan Malaysia (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) diantaranya :

- Mencapai keseimbangan optimal antara pembangunan perkotaan dan pedesaan
- Memastikan pertanian tetap kompetitif dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi
- Memastikan ekonomi terus berkembang dan menjaga stabilitas harga
- Mengurangi keberlanjutan kemiskinan dan akar penyebab kemiskinan
- Mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan relatif
- Perubahan pola pikir rakyat pedesaan
- Berkurangnya nilai pedesaan
- Kurangnya kepemimpinan desa
- Ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah
- Kesempatan kerja yang tidak menarik
- Terbatasnya peluang dalam bidang wirausaha
- Kurangnya prospek pasar dan keterampilan pemasaran
- Permasalahan tanah
- Rendahnya nilai tambah suatu produk
- Ketergantungan pada tenaga kerja asing
- Rendahnya produktivitas
- Rendahnya penyebaran pemukiman perdesaan
- Rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan

Kondisi saat itu memaksa harus menyikapi pembangunan daerah pedesaan yang berkaitan dengan kondisi awal di bawah-pengembangan sektor tradisional khususnya sektor pertanian yang pada dasarnya diabaikan selama pemerintahan kolonial. Selain itu, agenda untuk pengembangan budaya Melayu yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar dan kompromi yang disepakati antara Melayu dan non-Melayu sebelum kemerdekaan, yaitu perlindungan "Hak Istimewa Orang Melayu".

Indonesia merupakan negara berbasis desa, sebab 82,3% wilayah Indonesia merupakan kawasan pedesaan. Jumlah desa di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 72.944 desa (Permendagri 18 Tahun 2013). Menurut Undang-

Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan wilayah perkotaan yang sangat pesat menimbulkan isu signifikan yang ikut berpengaruh dalam pengembangan kawasan perdesaan. Isu-isu strategis pembangunan desa di Indonesia (Kementerian Badan Perencanaan Nasional) diantaranya adalah :

- a. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa ; Keterbatasan ketersediaan pelayanan umum dan pelayanan dasar minimum
- b. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan
- c. Belum optimalnya tata kelola desa dan peran kelembagaan desa dalam perencanaan dan pembangunan desa
- d. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan lingkungan hidup
- e. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dalam membuka keterisolasian daerah perdesaan dan mendorong keterkaitan Desa-Kota.

Sehingga untuk menjawab isu permasalahan pengembangan kawasan perdesaan tersebut, diamanatkan dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan pula tentang arahan bagi penataan ruang kawasan perdesaan, yaitu:

- pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- konservasi sumber daya alam;
- pelestarian warisan budaya lokal;
- pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan;
- penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-perkotaan.

Dari permasalahan dan isu seperti tersebut diatas antara di Malaysia dan Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian terhadap proses perencanaan pembangunan di tingkat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan suatu desa yang nantinya akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan yang merata di suatu Kabupaten/Kota, Provinsi dan bahkan Nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Bagaimana Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan Di Indonesia dan Malaysia.*

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia. Sasaran penelitian ini adalah :

- a. Teridentifikasi proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia
- b. Teridentifikasi konsep perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia
- c. Teridentifikasi pendekatan partisipatif dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan perdesaan

Manfaat dari penelitian terbagi menjadi 3, yaitu bagi masyarakat, pemerintah, dan akademis.

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kajian penerapan kebijakan dan peran institusi dalam pembanding suatu perencanaan di Indonesia. Dimana kebijakan dan peran institusi yang dilaksanakan lebih menitikberatkan pada keterlibatan secara aktif masyarakat dan stakeholder terkait.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi guna penelitian lebih lanjut tentang proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia berikut potensi pengembangannya di masa yang akan datang.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian studi komparatif adalah Desa Alamendah, Kabupaten Bandung-Indonesia dan Desa Peruas, Pahang-Malaysia.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dibahas secara keseluruhan selama meneliti adalah

- a. Menganalisis kebijakan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia
- b. Menganalisis doktrin perancangan dan pembangunan sejagat di Malaysia
- c. Menganalisis unsur perencanaan pembangunan perdesaan
- d. Menganalisis proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia
- e. Menganalisis konsep dan metodologi proses perencanaan pembangunan di perdesaan Indonesia dan Malaysia,
- f. Menganalisis pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan perdesaan
- g. Menganalisis pemberdayaan sumberdaya manusia perdesaan
- h. Menganalisis pemberdayaan kelembagaan yang terkait dalam perencanaan pembangunan perdesaan

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja yang terkandung di dalam tiap – tiap bab yang terdapat pada laporan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan dan Sasaran, ruang lingkup yang akan digunakan dalam studi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan Kajian Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi yang akan digunakan didalam penelitian Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia

BAB IV KOMPARATIF PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Bab ini akan membahas tentang perbandingan proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia, dan variabel perbandingan yang akan digunakan didalam penyusunan Kajian Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan menyajikan beberapa rekomendasi hasil Perbandingan pada proses perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia dan Malaysia